



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

#2023
#RKP THRIVE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
STASIUN PSDKP AMBON
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2023 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKj Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 10 Januari 2024
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Martin Yermias Luhulima, S.H., M.Si
NIP. 19750317 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾ Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁷⁾ Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; dan ⁽⁹⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM). Pada Tahun 2023 terdapat 24 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon. Dari 24 Indikator Kinerja terbagi atas 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2023 adalah 106.26 % (kategori baik) dengan total 23 Indikator Kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan 1 IKM yang tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni “*Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon*”.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	Capaian	%	
		2023	DESEMBER	DESEMBER	s/d DESEMBER		
S.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif			120	120		
	IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	80	100	100	120
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif			105,85	107,75		
	IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6	87,6	96,16	187,93	107,3
	IKS.02.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6	87,6	99,43	193,19	110,3
	IKS.02.3	Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas	100	100	100	100	100
S.03	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			100	100		
	IKS.03.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan			100	100		
	IKS.04.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	200	100
S.05	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan			100	100		
	IKS.05.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100
S.06	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan			100	100		
	IKS.06.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	200	100
S.07	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan			100	100		
	IKS.07.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan	100	100	100	100	100
S.08	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			120	120		
	IKS.08.1	Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	80	100	100	120
	IKS.08.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	80	100	100	120
	IKS.08.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut penguasaan sanksi administratif	80	80	100	100	120
S.09	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP			110,47	110,57		
	IKS.09.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	88,5	179,79	112,4
	IKS.09.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100	100	100	200	100
	IKS.09.3	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	78	78	91,07	91,07	116,8
	IKS.09.4	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80,5	80,5	83,3	83,3	103,5
	IKS.09.5	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	75	100	100	120
	IKS.09.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	21	23,19	23,19	110,4
	IKS.09.7	inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	1	1	1	100
	IKS.09.8	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	92	92	121,67	213,89	116,2
	IKS.09.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77,5	77,5	100	100	120
	IKS.09.10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77,5	77,5	100	100	120
	IKS.09.11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	93,75	93,75	92,42	92,42	98,58

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	Capaian	%
		2023	DESEMBER	DESEMBER	s/d DESEMBER	
	Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon					
IKS.09.12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82	82	87,67	87,67	106,9

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Tercapainya IKU dan IKM sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Ambon, baik itu pada Stasiun, Satuan Pengawasan, maupun juga Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon, serta Awak Kapal Pengawas yang saling mendukung dalam tercapainya target kegiatan pada Tahun 2023.

Hasil capaian pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran Tahun 2023 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 25.677.241.438 (*dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*) atau 98,65% dari total yang dianggarkan Rp. 26.029.469.000 (*dua puluh enam milyar dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan....	2
1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP2020–2024.....	6
2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	15
1. Sasaran Kegiatan 1.1 terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	15
2. Sasaran Kegiatan 2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan Pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	22
3. Sasaran Kegiatan 3.1 Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang partisipatif	33
4. Sasaran Kegiatan 3.2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	35
5. Sasaran Kegiatan 3.3 Terselenggaranya Pembagunan serta Perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	41
6. Sasaran Kegiatan 4.1 Terselenggaranya penanganan Pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	43
7. Sasaran Kegiatan 5.1 tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DITJEN PSDKP	49
3.3. Realisasi Anggaran TA. 2023.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023	iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023.....	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon tahun 2023.....	10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023	12
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2.1 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"	15
Tabel 3.3 Capaian kinerja IKU 2. "Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas"	16
Tabel 3.4 Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas	16
Tabel 3.5 Capaian IKU 3 "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas"	18
Tabel 3.6 Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	18
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan"	21
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Ruang Laut	24
Tabel 3.9 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	25
Tabel 3.10 Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.	26
Tabel 3.11 capaian kinerja IKU 6 "Persentase penyelesaian pemeriksaan usaha perikanan"	27
Tabel 3.12 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan	29
Tabel 3.13 Capaian IKU 7. "Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)"	30
Tabel 3.14 Capaian peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Ambon	31
Tabel 3.15 Capaian IKU 7 "Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"	32
Tabel 3.16 Capaian IKU 9. "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon"	32
Tabel 3.17 IKM 10 "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Ambon"	34
Tabel 3.18 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)"	36
Tabel 3.19 Capaian IKM 14 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"	39
Tabel 3.20 Rincian penyerapan anggaran per kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Tahun 2023	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023.....	4
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon.....	5
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023	12
Gambar 4. Capaian kinerja Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup UPT Ditjen PSDKP	17
Gambar 5. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP	20
Gambar 6. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	22
Gambar 7. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	28
Gambar 8. Capaian kinerja “Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)”lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	33
Gambar 9. Capaian kinerja IKM 9 lingkup DITJEN PSDKP	47
Gambar 10. Capaian IKM 10 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup UPT DITJEN PSDKP	35
Gambar 11. Capaian IKM 11 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”	37
Gambar 12. Capaian “ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT DITJEN PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”	40
Gambar 13. Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT DITJEN PSDKP	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon triwulanan Tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulanan III Tahun 2023 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 43 Orang.

- **Struktur Organisasi bagan struktur organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

- 1. Kepala Stasiun :**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Pelaksana Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon



2 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Renstra Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024; 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tahun 2023.

2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor : 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut :

2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan Visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

A. Visi

Visi Stasiun PSDKP Ambon 2020-2024 adalah “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Ditjen PSDKP Ambon Tahun 2020-2024, maka di tetapkan misi Ditjen PSDKP yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Ditjen PSDKP, maka disusunlah Visi misi Stasiun PSKDP Ambon tahun 2020-2024 : “Perairan Indonesia bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”. Untuk itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya Stasiun PSDKP Ambon dalam mewujudkan visi Stasiun PSDKP Ambon yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Ambon maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Ambon, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

D. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran kegiatan. Berikut Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 :

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;

4. Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP;
5. Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon

E. Perjanjian Kinerja tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 1. PEMBINAAN POKMASWAS				
SK.1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IK.1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
KEGIATAN 2. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK.2.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IK.2.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
		IK.2.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6
KEGIATAN 3. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN				
SK.3.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IK.3.1.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100%
KEGIATAN 4. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK.4.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai	IK.4.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	ketentuan		kelautan	
KEGIATAN 5. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK.5.1.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	IK.5.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100%
KEGIATAN 6. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK.6.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	IK.6.1.1	Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)	80%
KEGIATAN 7. PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK.7.1	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	IK.7.1.8	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93%
KEGIATAN 8. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PSDKP				
SK.8.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.8.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80
		IK.8.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80
		IK.8.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		IK.8.1.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	78
		IK.8.1.5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	90
		IK.8.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75%
		IK.8.1.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IK.8.1.8	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		IK.8.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	92%
		IK.8.1.10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77,5%
		IK.8.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77,5%
		IK.8.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	89
		IK.8.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82

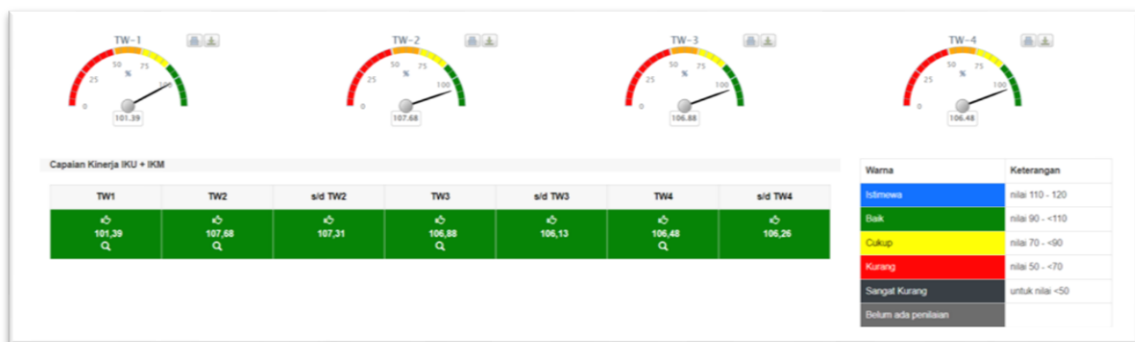
Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III

a. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Tahun 2023, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 106.26% dengan kategori hijau (baik) pada setiap Sasaran Kegiatan (Gambar 3).



Sumber : SAPK (Kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3.1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER	s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
S.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif			120	120					
IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	80	100	100	120	100	100	100	-
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif			105.85	107.75					
IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87.6	87.6	96.16	187.93	107.3	135		92.9	-
IKS.02.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87.6	87.6	99.43	193.19	110.3	114		89.8	-
IKS.02.3	Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas	100	100	100	100	100			90	-
S.03	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			100	100					

	IKS.03.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	S.04	Terseleenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan			100	100					
	IKS.04.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	200	100	44	100	100	-
	S.05	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan			100	100					
	IKS.05.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100				-
	S.06	Terseleenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan			100	100					
	IKS.06.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	200	100	100	100	100	-
	S.07	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan			100	100					
	IKS.07.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan	100	100	100	100	100				-
	S.08	Terseleenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			120	120					
	IKS.08.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	80	100	100	120	100	100	100	-
	IKS.08.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantaun sumber daya kelautan dan perikanan	80	80	100	100	120				-
	IKS.08.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	80	80	100	100	120				-
	S.09	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP			110.47	110.57					
	IKS.09.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	88.5	179.79	112.4	92.1	91.4	90.8	-
	IKS.09.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100	100	100	200	100	100			-
	IKS.09.3	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	78	78	91.07	91.07	116.8	73.6	72.3	80	-
	IKS.09.4	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80.5	80.5	83.3	83.3	103.5				-
	IKS.09.5	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	75	100	100	120			100	-
	IKS.09.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	21	23.19	23.19	110.4			23.2	-
	IKS.09.7	inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	1	1	1	100			1	-
	IKS.09.8	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	92	92	121.67	213.89	116.2	98.1	97.1	99	-
	IKS.09.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP	77.5	77.5	100	100	120	89.1	100	100	-

	Ambon									
IKS.09.10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77.5	77.5	100	100	120		92.2	100	-
IKS.09.11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93.75	93.75	92.42	92.42	98.58	97.6	92.3	93.7	-
IKS.09.12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82	82	87.67	87.67	106.9		86.9	86.6	-

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Tahun 2023, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas ”

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU I Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2023

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	80	100	120	100	125.00	100	100	100	

Indikator kinerja ini di tahun 2023 ditargetkan pencapaiannya sebesar 80% dan telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pembinaan

Pokmaswas pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu sebesar 100%. Hasil capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 diperoleh dari hasil penilaian beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh POKMASWAS Banda Lestari, POKMASWAS Pulau Hatta, POKMASWAS Plau Rhun. Turut hadir beberapa Instansi terkait Koramil 1502- 01 Banda, Pos TNI AL Banda, Polsek Banda, Pos Sandar Polair Banda, Cabang Dinas GP V DKP Provinsi Maluku, BKPP Kupang, 13 Kepala Desa yang ada di Kawasan Konservasi Laut Banda, dan beberapa LSM yang ada di Banda. Sosialisasi tersebut membahas tentang urgensi permasalahan yang terjadi di Pulau Banda meliputi Pengambilan pasir laut untuk pembangunan dan permasalahan sampah yang belum bisa diatasi.
2. Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Tahun 2023 di Desa Larike dihadiri oleh 114 orang peserta yang terdiri dari POKMASWAS HASROKA dan POKMASWAS PELASONA. Turut hadir beberapa Instansi terkait yaitu Cabang Dinas GP I DKP Provinsi Maluku, Polsek Kecamatan Leihitu Barat, Kepala dan Perangkat Desa Larike, Kepala Bintara Pembina Desa Larike, Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sosialisasi tersebut membahas tentang maraknya nelayan yang melakukan pengeboman ikan dengan menggunakan bom pada perairan pulau haruku.
3. Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Waitina Kec.Mangoli Timur Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Tahun 2023 dihadiri oleh 109 Orang Anggota POKMASWAS serta instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Tenaga Ahli Ibu Alien Mus yang diwakili

oleh Tenaga Ahli Ibu Alien Mus , Kepala Desa Waitine ,Kepala Desa Karamat, kepala Desa Naflo dan Kepala Desa Jere. Sosialisasi tersebut membahas tentang illegal fishing dan destructive fishing yang marak terjadi di Kepulauan Sula.

Tabel 3.3. Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS

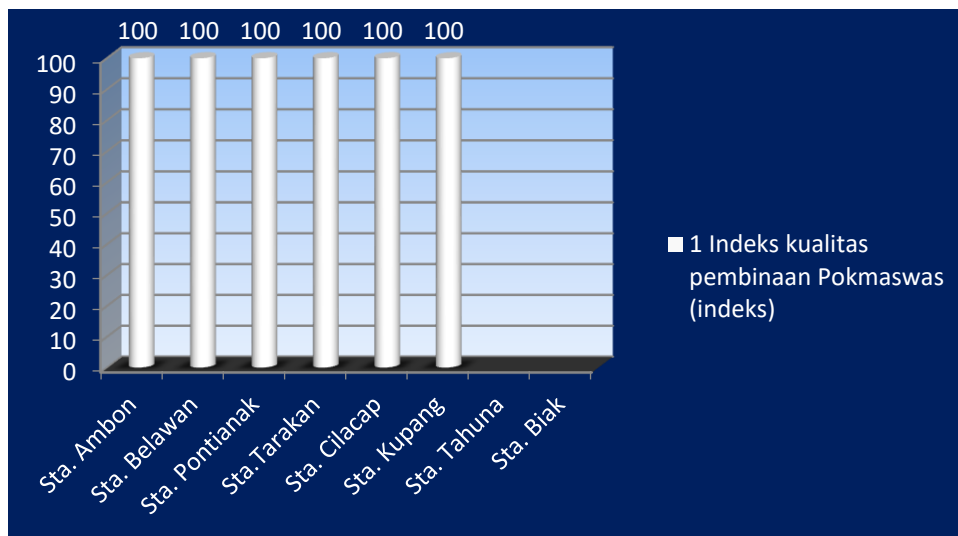
No	Kegiatan	(a)	(b)	(c)
1	Pembinaan POKMASWAS Banda Bersama Anggota DPR RI Ibu Saadiyah Uluputty, ST	√	√	√
2	Pembinaan POKMASWAS Kep. Sanana Bersama Ibu Alien Mus SH	√	√	√
3	Pembinaan POKMASWAS Kab. Maluku Tengah bersama Bpk.Ir. Abdullah Tuasikal, M.SI.	√	√	√

Formula:
$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

- x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)
- a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)
- b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
- c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas telah tercapai oleh UPT PSDKP bahkan melebihi dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.



Gambar 3.2. Grafik Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas UPT PSDKP Tahun 2023

2. IKU 2.1 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja Utama 2 “ Indeks kinerja operasi kapal pengawas” telah terealisasi sebesar 96.16 dari target 87.6 atau 107.3.

Tabel 3.4. Capaian kinerja IKU 2. “Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87.6	87.6	96.16	109.8	96.16	109.77	135		92.9	

Jika disandingkan dengan nilai capaian kerja pada tahun-tahun sebelumnya, nilai capaian kinerja yang dicapai di tahun 2023 lebih besar dari capaian kinerja operasi kapal pengawas di tahun 2022 dan dapat dikatakan melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023. Namun dapat dilihat bahwa capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan, tidak terlepas dari peran Awak Kapal Pengawas HIU 13 dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan gelar operasi pada WPPNRI 714 dan 715 dalam memerikan pelaku pemanfaatan perikanan dan kelautan pada wilayah tersebut.

Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kinerja kapal pengawas HIU 13 dengan variabel pembentuk :

1. Pemeriksaan (70%) : Nilai 60,392
2. Pemeriksaan kelautan dan Perikanan (30%) : Nilai 36,16
3. Cakupan Wilayah Pengawasan (40%): Nilai 40
4. Tindak Lanjut Target Operasi (15%): Nilai 15
5. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%) : Nilai 5

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks kinerja kapal pengawas pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

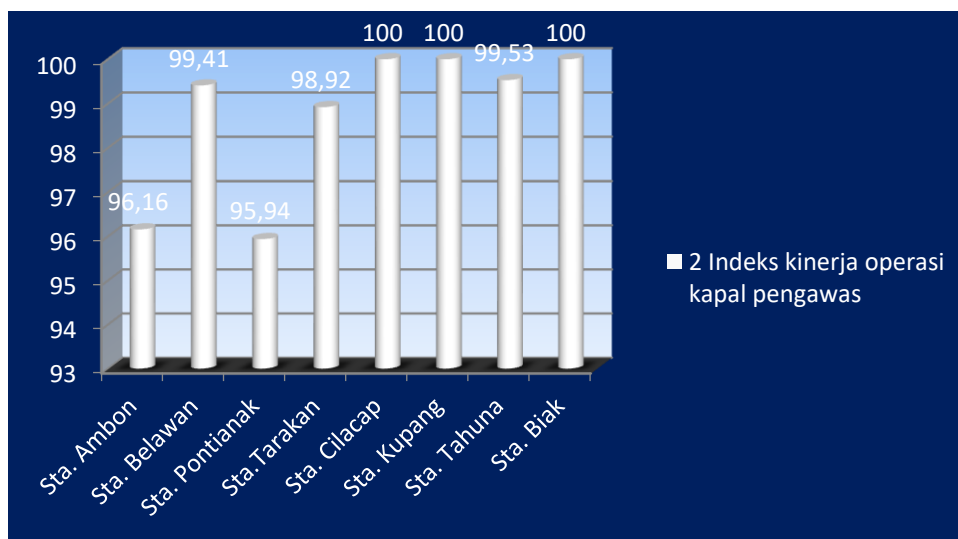
Tabel 3.5. Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TIM KERJA SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN STASIUN PSDKP AMBON TAHUN 2023

Indeks kinerja operasi kapal pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Ambon

Subter	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)		Pemeriksaan Kelautan (30%)		Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan		Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)		Intersept Indikasi Pelanggaran (50%)		Dukungan Kegiatan SAR (40%)		Tindak Lanjut Target Operasi (15%)		Penyediaan Alat Tangkap Terbang (30%)		Pemutusan Rumpun Regal (30%)		Dukungan Operasi Bernama (40%)		Dukungan Operasi Lainnya (5%)		Total Nilai Indeks	Nilai per Subter
		Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi	Tarjpt	Realisasi		
Stasiun PSDKP Ambon	KP. HIU 13	0	0	0	0	0	0	1,49	2,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,392	60,392

Berdasarkan variable pembentuk dalam perhitungan indeks kinerja kapal pengawas HIU 13, pada tahun 2023 ini Kapal Pengawas HIU 13 telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 KII dan 2 KII yang ditangkap karna tidak sesuai daerah penangkapan ikan. Hal ini merupakan capaian yang patut diapresiasi karena kapal yang ditangkap telah ditindaklanjuti oleh penyidik dan pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam putusan sanksi administrasi terhadap kapal-kapal tersebut. Selain pemeriksaan kapal perikanan, KP. HIU 13 juga telah mencapai persentase cakupan wilayah pengawasan dengan realisasi 2,20 dari yang ditargetkan 1.49. Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU ini adalah senilai Rp. 8.416.597.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.108.505.096,- atau 84.46%.



Gambar 3.3. Capaian kinerja Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup UPT Ditjen PSDKP tahun 2023

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan hasil mencapai lebih dari 95%(Gambar 3.3).

3. IKU 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja Utama 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” telah terealisasi sebesar 99.43 dari target 87.6 atau 110.3% (Tabel 3.6).

Tabel 3.6. Capaian IKU 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87.6	87.6	99.43	113.5	99.43	113.50	114		89.8	

Capaian pada IKU ini tidak lebih besar daripada capaian IKU tahun 2020 namun lebih besar daripada capaian pada IKU tahun 2022, sehingga menjadi tolak ukur untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan capaian pada triwulan/tahun selanjutnya. Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran operator speedboat, pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target

yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon :

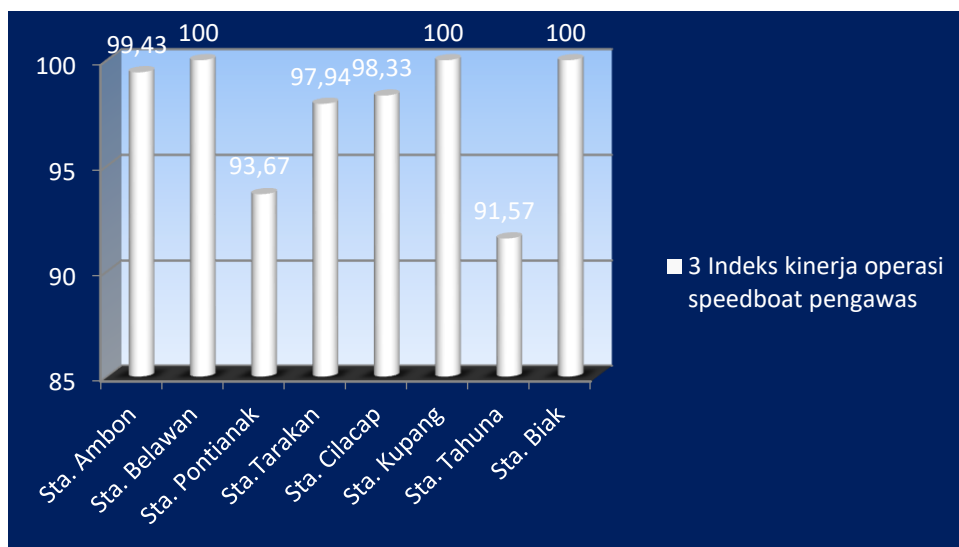
Tabel 3.7. Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelulusan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelulusan dan Pengawasan			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indeks Pengawasan (50%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tidak Lajut Target Operasi (5%)			Penyediaan Alat Tangkap Terawang (40%)			Pemutusan Rumpun Reput (40%)			Dukungan Operasi Bernama (50%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satuan
		Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai	Target	Hasil	Nilai						
Stasiun PSDKP Ambon	Napoleon 40	23	23	100	0	0	0	40	40	100	0,00000	0,00000	40,00	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	100	100	
	Napoleon 51	25	24	96,00	0	0	0	50	47,5	95,00	0,00000	0,00000	40,00	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	99,43	100	
	Napoleon 55	32	32	100	0	0	0	50	50	100	0,00000	0,00000	40,00	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	100	100	100
	Tertinggi	30	29	96,67	0	0	0	50	48	96,00	0,00000	0,00000	40,00	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	0	0	0	40	40	100	98,33	100	100

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indeks kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon dengan jumlah hari operasi 11 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 8 KII dan 1 KIA. Pada tahun 2023 ini, belum 4 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan 2 speedboat pengawas (Napoleon 040 dan Napoleon 055) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. Namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 2 unit speedboat lainnya (Napoleon 051 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU ini adalah senilai Rp. 877.403.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.454.826,- atau 6.09%.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian presentase berkisar antara 91-100%(Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

4. IKU 4 “Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas”

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan. Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI.

Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar. Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM. Pemenuhan logistik khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud.

Tabel 3.8. Capaian IKU 4 “Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
4	Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas	100	100	100	100	100	100.00			90	

IKU ini tidak ditargetkan pada tahun 2020 dan 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan peningkatan capaian, namun setidaknya nilai capaian yang didapatkan di tahun 2023 lebih besar dari nilai capaian di tahun 2022 sehingga menjadi tolak ukur untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan capaian pada triwulan/tahun selanjutnya.

Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran operator speedboat, pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP.

Tabel 3.9 Perhitungan Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas

FORMULA:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

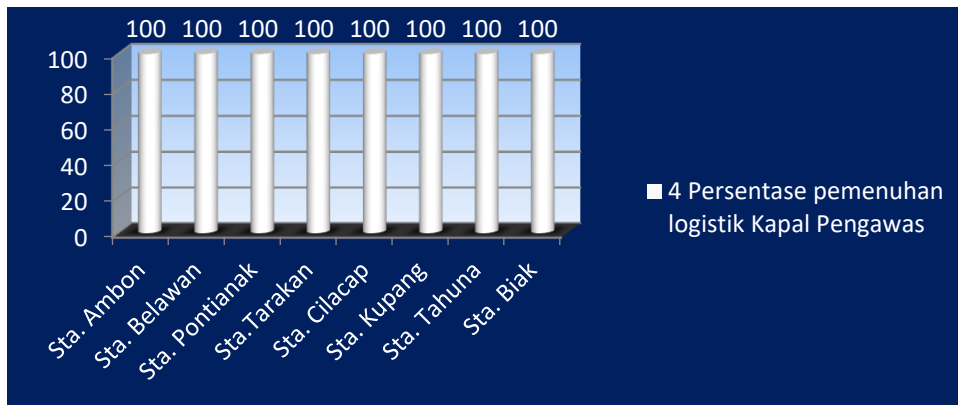
Keterangan:

- x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
- x_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
- x_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Kriteria Penilaian	faktor penghitung	Target					Realisasi				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi
1. Bahan Bakar Minyak											
Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi	30%	7,5	7,5	7,5	7,5	30	7,5	7,5	7,5	7,5	30
2. Pelumas (20%);											
Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas	20%	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
3. Bahan Makanan (25%);											
Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak	25%	7,5	7,5	7,5	7,5	30	7,5	7,5	7,5	7,5	30
4. Air Tawar (15%);											
Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari	15%	3,75	3,75	3,75	3,75	15	3,75	3,75	3,75	3,75	15
5. Alat – Alat Pelayanan											
Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan	5%	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
6. Alat – Alat Pelayanan											
Pemenuhan Kebutuhan	5%	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		28,75	23,75	23,75	23,75	100	28,75	23,75	23,75	23,75	100
			100					100			

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indkes kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon dengan jumlah hari operasi 11 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 8 KII dan 1 KIA. Pada tahun 2023 ini, belum 4 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan 2 speedboat pengawas (Napoleon 040 dan Napoleon 055) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. Namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 2 unit speedboat lainnya (Napoleon 051 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU ini adalah senilai Rp. 877.403.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.454.826,- atau 6.09%.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian presentase sebesar 100%(Gambar 3.5).



Gambar 3.5. Capaian kinerja “Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

5. IKU 5 “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP”

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan. Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI. Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar. Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM. Pemenuhan logistik khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud.

Tabel 3.10. Capaian IKU 5 “pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	2020	2021	2022	s.d 2024	
5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	

Indikator kinerja ini di tahun 2023 ditargetkan pencapaiannya sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan hasil capaian Indeks pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu sebesar 100%. Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan

dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 4 (empat) unit *Speedboat*. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) 50% dengan nilai 50;
2. Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) 40% dengan nilai 40, dan
3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) 10% dengan nilai 10.

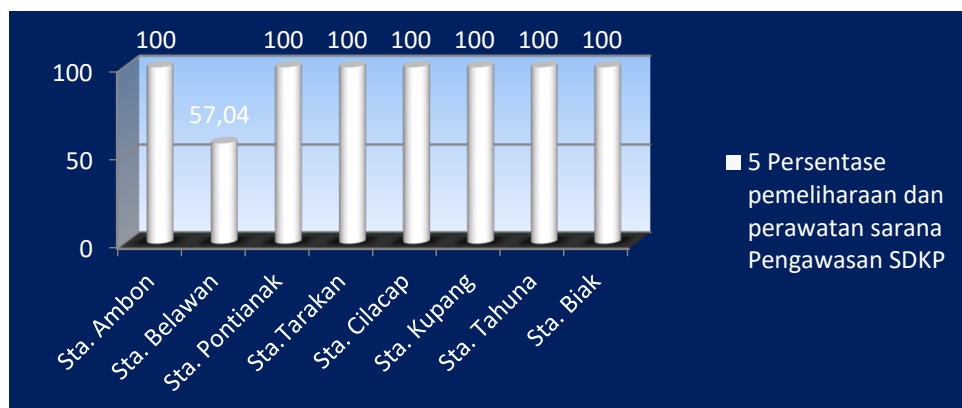
Tabel 3.11 Perhitungan Indeks kinerja pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I PERAWATAN PREVENTIF (50)						
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100	50	Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
II PERAWATAN PREDIKTIF (40)						
1	Overhaul	1	1	100	40	Tidak dilakukan
2	Kalibrasi	1	1	100		Tidak dilakukan
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
III PERAWATAN DARURAT (10)						
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100	10	- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST Dokumen Perawatan Darurat Kapal Pengawas
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indeks kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon dengan jumlah hari operasi 11 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 8 KII dan 1 KIA. Pada tahun 2023 ini, belum 4 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan 2 speedboat pengawas (Napoleon 040 dan Napoleon 055) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. Namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 2 unit speedboat lainnya (Napoleon 051 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi. Total anggaran yang dialokasikan

untuk IKU ini adalah senilai Rp. 877.403.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.454.826,- atau 6.09%.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa hampir seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian presentase yaitu sebesar 100% namun untuk terkecuali Stasiun PSDKP Belawan yang memiliki nilai presentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP sebesar 57.04 (Gambar 3.6).



Gambar 3.6. Capaian kinerja “Indeks kinerja pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

6. IKU 6 “Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan *Destructive Fishing* (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil *Destructive Fishing*). Pada tahun 2023 capaian IKU 5

“Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan” adalah 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% .

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja 6 Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

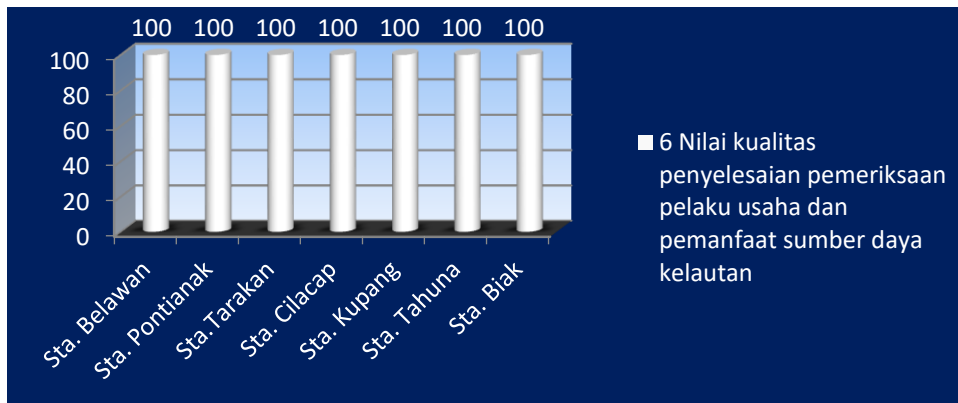
No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
6	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	100	100	100.00	44	100	100	

IKU ini jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya dapat dilihat bawa Stasiun PSDKP Ambon mampu meningkatkan sekaligus mempertahankan capaian kinerja. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

- a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
- c) Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- d) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
- e) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
- f) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari polsus WP3K dan pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%.



Gambar 3.7. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

❖ 6 Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Parameter pengukuran terdiri dari :

- Memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- Memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- Kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

Tahun 2023 pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya ditargetkan pemeriksaan terhadap 9 Pelaku Usaha (Tabel 3.13).

Tabel 3.13 Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah Tahun 2023

No.	Pelaku Usaha	Jenis Kegiatan/Usaha yang diawasi	NIB	Izin Lingkungan
1	PT. Maluku Prima Makmur	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 8120001970582	-
2	PT. Peduli Laut Maluku	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 8120113030328	660.1/02/DLH/IL/III/2018
3	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 8120213051393	660.1/155/BLH/IX/2015
4	PT. Maluku Prima Sukses	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 9120007522659	660.1/03/DLH/IL/IV/2020
5	PT. Harta Samudra	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 8120116081128	660.1/09/DLH/PPKPLH/XII/2022
6	PT. Intimas Surya	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 8120003851916	-
7	PT. Wahana Lestari Investama	Unit Pembenihan Udang	NIB : 9120203590631	Sudah Ada di OSS
8	PT. Kelola Mina Samudra	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 9120404750592	13/DPMPTSP/VI/2018
9	PT. Mitra Tuna Mandiri	Unit Pengolahan Ikan	NIB : 1402220054153	21052201182710000

2. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapaun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan
- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian
- pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan

- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar
- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- landing, take off, dan taxiing seaplane

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk perusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya)
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan.

Tabel 3.14. Pengawasan Wilayah Konservasi Tahun 2023

No	Nama Kawasan Konservasi	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Luas	Titik Koordinat
1	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Harun	Desa Nusantara, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku	2500 Ha	04°32'.8" S - 129°53'.7" E
		Ali Syarif	Desa Merdeka, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°32'.15" LS - 129°54'.32" BT
		Rinaldi	Desa Kumber, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°32'.5" LS - 129°55'.5" BT
		Hasan	Desa Kampung Baru, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°31'.16" LS - 129°54'.45" BT
		Ismail Rabidin	Desa Nusantara, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°30'.012" LS - 129°53'.344" BT
		Jafar (KM. Afifah)	Desa Tanah Rata, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°29'.57" LS - 129°54'.7" BT
		Maskat	Desa Selamon, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°30'5" LS - 129°56'5" BT
2	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Kadri Lalonto	Desa Kumber, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku	2500 Ha	4°32'26.52"LS - 129°55'6.13"BT
		La Hasan	Desa Selamon, Kec.		4°31'11.94"LS -

			Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		129°55'56.74" BT
3	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Ali Ibrahim	Desa Kampung Baru, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku	2500 Ha	04°31'.050" S - 129°54'.021" E
		Zaenal Jumad	Desa Walang, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°31'.048" S - 129°54'.022" E
		CV. Santara Raya	Desa Walang, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°31'.050" S - 129°54'.021" E
		CV. Mitra Nelayan	Desa Kampung Baru, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°31'.048" S - 129°54'.021" E
		PT. Harta Samudera	Desa Kampung Baru, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°31'.048" S - 129°54'.022" E
4	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Yuman Hasan	Desa Merdeka, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku	2500 Ha	04°30'.15" S - 129°51'.51" E
		Mohamad	Desa Nusantara, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°30'.29" S - 129°52'.47" E
		Lakaria	Desa Nusantara, Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku		04°30'.05" S - 129°52'.45" E
5	Taman Wisata Perairan Laut Banda	-	-	2500 Ha	-4,5159 LS - 129,9288 BT

3. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya.

Pada tahun 2023 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Stasiun PSDKP Ambon adalah sebanyak 2 pelaku usaha.

Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPRL;
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 pelaku usaha yakni PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kab. Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan PT. Rajawali Laut Timur, Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Pengawasan Ruang Laut

No	Pelaku Usaha	NIB	Izin KKPRL	NO. KBLI
1	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)	NIB : 8120315042745	Nomor KKPRL : 1601231051820002	KBLI : 68130
2	PT. Rajawali Laut Timur	NIB : 9120200161673	Nomor KKPRL : 02082210518100004	KBLI : 03211

4. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya

Pada tahun 2023 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 2 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

NO	PELAKU USAHA	NIB	TITIK KOORDINAT	JENIS IKAN
1	CV. Indo Marine Fish	NIB : '9120501810162	03°1'23" LS - 128°4'23" BT	Ikan Napoleon
2	UD. Aprilia Samudra Geser	NIB : 8120210232413	4°7'14.9" LS - 130°54'5.4" BT	Ikan Hiu
3	UD. Raffa Seafood	NIB : 9120208901474	0°40'11.0" LS - 127°28'33.2" BT	Ikan Hiu dan Ikan Pari
4	UD. Wilda	NIB : 1298000102628	0°38'19.0" LS - 127°28'50.2" BT	Ikan Hiu Sutra
5	UD. Walijaya I	NIB : 9120003992466	-2.042067 LS - 125.971066 BT	Ikan Hiu dan Ikan Pari
6	Abd Umar Syarabiti	NIB : 0903230057829	3°42'30.77" LS - 128°5'56.01" BT	Ikan Sidat

7	UD. Alinaa	NIB : 9120403822181	3.0610913 LS - 130.4605353 BT	Ikan Hiu dan Ikan Pari
8	Arahman Amir	NIB : 8120114222606	03°08'23.1" LS - 127°55'44.4" BT	Ikan Hiu

5. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Pada tahun 2023 pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 8 pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil terfokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian
- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Tabel 3.17. Pengawasan Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

No	Pelaku Usaha	NIB	Titik Koordinat
1	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)	NIB : 8120315042745	0°28'57" LU - 127°59'6" BT
2	PT. Bahana Maluku	NIB : 1279000231193	3.641992 LS - 128.267151 BT
3	PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara	NIB : 9120301362004	0°3'47.82" S - 129°23'7.14" BT
4	PT. Mineral Trobos	NIB : 8120012160852	0°2'34" LS - 129°23'15" BT
5	PT. Anugerah Sukses Mining	NIB : 8120012160852	0°10'11" LS - 129°30'46" BT

6	PT. Smart Marsindo	NIB : 2711210011088	0°2.62" S - 129°22'50.50" BT
7	PT. Bartra Putra Mulia	NIB : 9120317082914	0°11'35" LS - 129°33'48" BT
8	PT. Rajawali Laut Timur	NIB : 9120200161673	3°38'14" LS - 128°12'52" BT

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km²/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Pada triwulan I tahun 2023 belum dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya.

6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Pada tahun 2023 target pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah sebanyak 30 pelaku usaha. *Destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Kegiatan pengawasan ditargetkan pada Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan *Destructive Fishing* (DF). Parameter verifikasinya adalah tidak menggunakan dan/atau memiliki bom ikan/racun ikan dan setrum ikan. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebanyak 5 pelaku usaha. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.18. Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

Nama Kapal	Penanggung Jawab Kapal/Pemilik Nama	Alat Tangkap	Lokasi Penangkapan
-	Muhammad	Pancing Dasar	02°7822118" LS - 129°0485396" BT
Jelion's	Marttinus Lakmau	Pancing Ulur	02°773962"LS - 129°0322043"BT
-	Eke	Pancing Dasar	02°74'37.39"LS - 129°98'18.51"BT
KM. Syalu	La Arifin	Pancing Ulur	02°7568939"LS - 129°0309205"BT
-	La Ode	Pancing Dasar	02°7910792"LS - 129°0659485"BT
-	Stenly Rikumahu	Pancing Dasar	-3°705019" LS dan 129°151426" BT

KM. Ade Rey	Yusuf Tuhusula	Pancing Ulur	-3°794468" LS dan 128°086703" BT
-	Yacobis Opier	Pancing Ulur	-3°795273" LS - 128°086405" BT
-	Wenang Salamor	Pancing Ulur	-3°792935" LS - 129°086795" BT
-	Romel Laturua	Pancing Ulur	-3°7777848" LS - 128°09884" BT
KM. De Noel	Victor Wattimena	Pure Seine	03°45'21.1" LS - 128°06'53.3" BT
KM. Krisna 007	Yaniman Hatumeten	Pure Seine	-3°7593070" LS - 128°1120070" BT
-	Nasir	Jaring Purse Saine	-2°937'675"S - 128°113'083"E
-	Acan	Jaring Purse Saine	-2°928'486"S - 128°118'551"E
-	Taufik	Jaring Purse Saine	-2°928'486"S - 128°118'551"E
-	Ansar	Pancing Tonda	2°907'208"S - 128°121'883"E
-	Sarman Melu	Pancing Tonda	-2°914'208"S - 128°112'873"E
-	La Ode Supardi	Pancing Tonda	-2°914'208"S - 128°118'878"E
-	Husni	Pancing Tonda	-2°914'208"S - 128°118'878"E
-	Faisal	Pancing Tonda	-2°925'508"S - 128°124'043"E
-	Ode Usman	Pancing Tonda	-2°925'185"S - 128°124'248"E
-	Salim	Longboat Penambung	2°955'404"S - 128°124'114"E
-	Ode Rifani	Longboat Penambung	-2°908'805"S - 128°127'561"E
-	Acil	Longboat Penambung	-2°911'341"S - 128°127'787"E
-	Kadri Lalonto	Pancing Dasar	4°32'26.52"LS - 129°55'6.13"BT
-	La Hasan	Pancing Dasar	4°31'11.94"LS - 129°55'56.74" BT
KM. Dak DKP HB 2020 10	Nataniel Ngangangor	Hand Line	1°00'55.0"N - 127°21'46.6"E
-	Udin Abdullah	Pancing Tonda	0°57'11.0"N 127°30'02.0"E
-	Sabudin Hi. Kadir	Hand Line	0°43'43.1"N 127°32'34.1"E
KM. Dak DKP HB 2020 01	Sukri Karibun	Hand Line	1°03'16.5"N 127°22'25.9"E.
KM. Dak DKP HB 2020 07	Robi Rio Parate	Hand Line	1°01'57.7"N 127°25'39.5"E.
-	Munawir Tatali	Hand Line	1°02'14.3"N 127°26'08.9"E
-	Timon Malikede	Pancing Tonda	0°54'00.9"N 127°25'32.7"E
KM. Nabila	Bpk. Abidun	Hand Line	1°00'07.3"N 127°27'34.2"E.
KM. Siokona	Bpk. Arifin	Hand Line	0°57'34.1"N 127°30'21.2"E
KM. Putra Agung	Bpk. Idrus	Hand Line	0°56'10.6"N 127°27'07.9"E
KM. Nabila	Ikram Kalumpa	Hand Line	0°50'31.4"N 127°27'28.2"E
KM. PMN	Muhammad Fitri	Hand Line	0°50'10.6"N 127°33'28.9"E
KM. Guntur I	Talib Yakub	Hand Line	0°45'29.8"N 127°34'48.5"E.
KM. Selfia	Sarmin Harun	Hand Line	0°46'13.9"N 127°35'32.8"E
KM. Jolor 03	Hj. AH Yani	Panah	1°19.925' S -127°42.761' E.
KM. Inaya Jaya 02	Hj Kamariya	Panah	1°29.932' S -127°42.761' E
KM. Sarli	Masturi	Panah	0°43.034' S - 128°3.648' E
KM. Usaha Baru II	Nawir	Panah	0°42.342' S -128°3.195' E.
KM. Maju Jaya	Riyan Zainori	Panah	0°50.649' S -127°50.646' E.
KM. Sumber	Mamsuri	Panah	0°56.575' S - 128°18.630' E
KM. Inaya Jaya	Hj. RASID	Panah	1°36.081' S -127°23.879' E.
-	Samsul	Pancing Ulur	-3°361'466"S - 128°968'723"E
-	La Dami	Pancing Dasar	-3°361'422" S - 128°968'804" E
-	Yosi Kumul	Pancing Dasar	-3°301'285"LS - 128°95'79"BT
-	Musa Souhoka	Pancing Dasar	3°31'57" LS - 128°94'92" BT
-	La Rajab	Pancing Dasar	3°30'55" LS - 128°94'51" BT
-	Udin Wally	Pancing Dasar	3°31'52" LS - 128°91'81" BT
-	Badrun	Pancing Dasar	3°29'84" LS - 128°95'55" BT
-	Irwan	Pancing Ulur	3°42'34" LS - 129°02'03" BT
-	Muiin	Pancing Ulur	3°41'53" LS - 129°02'29" BT
-	Lukman	Pancing Ulur	3°41'45" LS - 129°02'70" BT

7. IKU 7 “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan”

Intelijen yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

Tabel 3.19 Capaian IKU 7 “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
7	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100	100.00				

IKU ini tidak ditargetkan pada tahun 2020,2021 dan 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan peningkatan capaian, namun patut diapresiasi bahwa nilai capaian yang di capai di tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga menjadi tolak ukur untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan capaian pada triwulan/tahun selanjutnya. Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran Polsus PWP3K, serta pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target yang ditetapkan khususnya dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan.

Tabel 3.20 Perhitungan Indeks kinerja penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan

Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Laporan Masyarakat/Pulbaket	Target	Selesai
1	1. PT. Semar Marsindo 2. PT. Mineral Trobos 3. PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara 4. PT. Anugerah Sukses Minig	Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Pulbaket berdasarkan data citra satelit dalam pemanfaatan ruang laut	√	√
2	Tambang Nikel Harita	Pulau Garaga, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran akibat aktifitas tambang nikel PT.	√	√
3	PT. Emerald Ferrochromium Industry	Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara	Pulbaket berdasarkan data citra satelit dalam pemanfaatan ruang laut	√	√

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

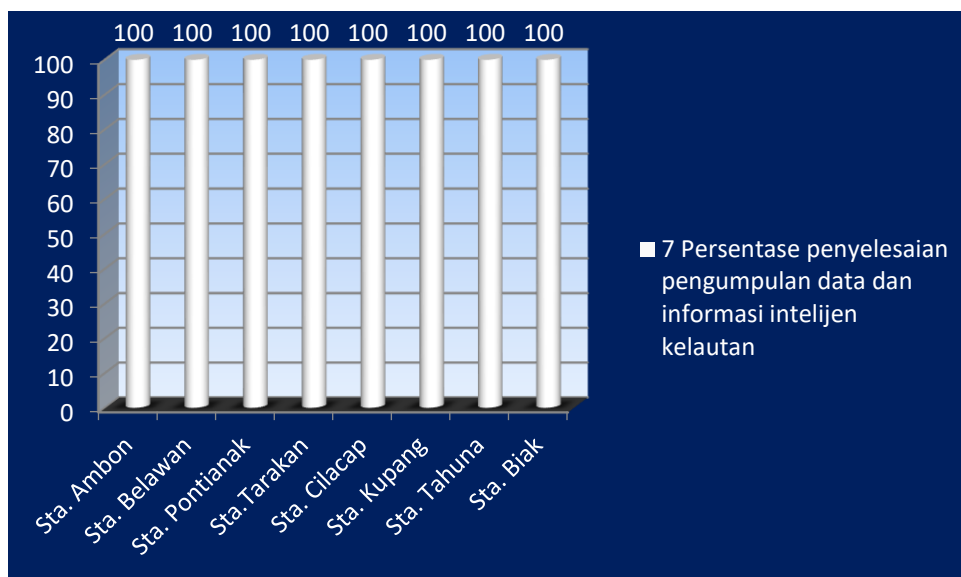
X_{intl} : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan

b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indeks kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon dengan jumlah hari operasi 11 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 8 KII dan 1 KIA. Pada tahun 2023 ini, belum 4 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan 2 speedboat pengawas (Napoleon 040 dan Napoleon 055) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. Namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 2 unit speedboat lainnya (Napoleon 051 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU ini adalah senilai Rp. 877.403.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.454.826,- atau 6.09%.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian presentase sebesar 100%(Gambar 3.8).



Gambar 3.8. Capaian kinerja “kinerja penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan”

8. IKU 8 “Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Pada tahun 2023 capaian kinerja IKU 8 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan” yakni 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% (tabel 3.21)

Tabel 3.21. Capaian kinerja IKU 8 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	

Berdasarkan data capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan” jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian dan menjadi tolak ukur tercapainya IKU ini dalam target jangka menengah yaitu sebesar 100%. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian setiap UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.21.

Tabel 3.21. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Laporan Masyarakat/Pulbaket	Target	Selesai
1	1. PT. Semar Marsindo 2. PT. Mineral Trobos 3. PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara 4. PT. Anugerah Sukses Minig	Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Pulbaket berdasarkan data citra satelit dalam pemanfaatan ruang laut	√	√
2	Tambang Nikel Harita	Pulau Garaga, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran akibat aktifitas tambang nikel PT.	√	√
3	PT. Emerald Ferrochromium Industry	Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara	Pulbaket berdasarkan data citra satelit dalam pemanfaatan ruang laut	√	√

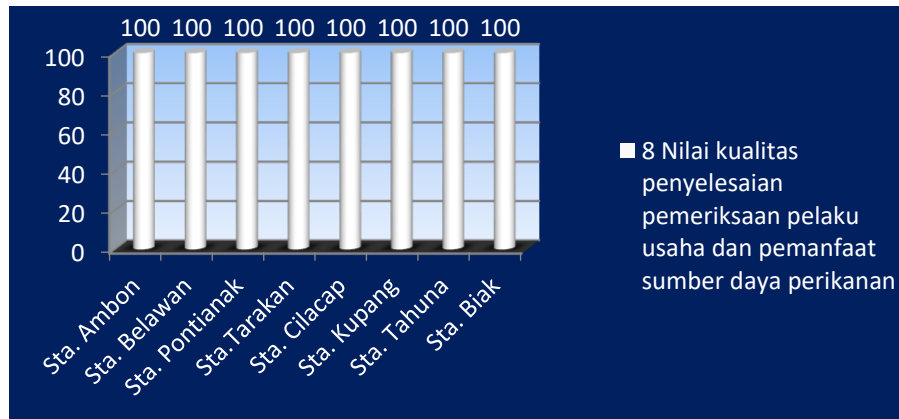
Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{intl} : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
 a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan
 b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan. Anggaran yang dialokasikan untuk ini adalah Rp. 290.250.000,- dan telah terealisasi sebesar 23.061.546 atau 7.95%.



Gambar 3.9. Capaian kinerja “kinerja penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan”

Ukuran keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;
2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;
3. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
4. Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, rajungan; dan
5. Pengawasan incidental.

Pada telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resikp berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ **Pengawasan Kapal Perikanan**

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 6 pelaku usaha untuk Kapal Penangkap yakni milik PT. Starindo Jaya Sukses, Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama, Ahar, Hairul Akbar, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, dan Fredi Melkias, serta 4 pelaku usaha untuk Kapal Pengangkut yakni milik PT. Intimas Surya, PT. Berkat Samudra Lestari , PT. Rajawali Laut Timur dan Lie Alfianto Lijaya . Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.22. Hasil Pengawasan Kapal Perikanan (Kapal Penangkap)

NO	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Nomor Kode Proyek	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Skala Usaha
1	KM. Yuiee Jaya - II	PT. Starindo Jaya Sukses	1403220055208	Sudah ada di OSS	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Menengah
2	KM. Nelayan 2017 986	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	Sudah ada di OSS	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
3	KM. Resky Amanda AF 01	Ahar	2202220049483	Sudah ada di OSS	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Kecil
4	KM. Reski Abadi 03	Hairul Akbar	2202220049483	Sudah ada di OSS	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Kecil
5	KM. Raja Mas	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	8120213051393	Sudah ada di OSS	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
6	KM. Mitra Tomini 03	Fredi Melkias	9120002353114	Sudah ada di OSS	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Menengah

Tabel 3.23. Hasil Pengawasan Kapal Perikanan (Kapal Pengangkut)

NO	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Kode Proyek	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Skala Usaha
1	KM. Sumber Tuna	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
2	KM. Jimmy Wijaya XXXV	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
3	KM. Hiroyoshi - 08	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
4	KM. Mutiara 89	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
5	KM. Mutiara 20	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
6	KM. Sejahtera 6	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
7	KM. Sejahtera 07	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri	Menengah dan Besar

			oss	Untuk Barang Khusus	
8	KM. Abadi Jaya 101	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
9	KM. Hiroyoshi - 08	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
10	KM. Abadi Jaya 101	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
11	KM. Sumber Tuna	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
12	KM. Fu Yuan Yu Yun 993	PT. Berkat Samudra Lestari	sudah ada di dalam sistem oss	50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk barang khusus	Menengah dan Besar
13	KM. Rajawali Perkasa 105	PT. Rajawali Laut Timur	sudah ada di dalam sistem oss	50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Menengah dan Besar
14	KM. Mutiara 89	PT. Intimas Surya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 -	Menengah dan Besar
15	KM. Jundry Jaya - III	Lie Alfianto Lijaya	sudah ada di dalam sistem oss	50133 -	Kecil

❖ Pengawasan Budidaya Hasil Perikanan

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan budidaya hasil perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 20 pelaku usaha dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Hasil Pengawasan Budidaya Perikanan

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	NIB	Kode KBLI	Nama KBLI	Skala Usaha
1	Asdi Selang (Koperasi Nelayan Panggayong)	Koperasi Nelayan Panggayong	1204230045795	03211 -	Pembesaran Ikan / Pisces bersirip di laut	Mikro
2	Yahya Makatita	Bubara Karamba	1222000413605	03211 -	Pembesaran Ikan / Pisces bersirip di laut	Mikro
3	Pokdakan Bubara	Achmad Rahim	-	03211 -	Pembesaran Ikan / Pisces bersirip di laut	Mikro
4	Pokdakan Kerapu	Mansir	-	03211 -	Pembesaran Ikan / Pisces bersirip di laut	Mikro
5	M. Ruslan	Usaha Bersama II	2305220043683	03211 -	Pembesaran Ikan / Pisces bersirip di laut	Mikro
6	Badar A. Bese	Pokdakan Fatilhuda berkarya	2305220047349	'03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
7	PT. Maluku Utara Fisheries	PT. Maluku Utara Fisheries	8120017021605	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Mikro
8	Pami Allimun	Pami Allimun	-		-	Mikro

9	Syarel Kelyanin	Pokdakan Marthafons	705230011692	3211	Pembesaran Ikan / Pisces bersirip di laut	Mikro
10	Jusuf Tanamal	Pokdakan Lalosi	1308220015107	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Mikro
11	Jeane Tuhumury	Pokdakan Kakap Putih	0808220014428	1. KBLI 03232 2 KBLI 03211	1. Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut 2. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	Mikro
12	Darius Silubun	Pokdakan Jembatan Merah Putih	-	-	-	-
13	Karel Albert Ralahalu	PT. Wahana Lestari Infestama	9120203590631	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Besar
14	Slamet Kasri	Pokdakan Mekar Sari	2811230050932	1. 03221 2. 03226	1. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam 2. Pembenihan Ikan Air tawar	Mikro
15	Widji Sumarsono	Pokdakan Mino Sari	2811230023278	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro
16	Samsul Hi. Nurdin	Pokdakan Usaha Bersama	1307230129672	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Mikro
17	Yance	Pokdakan Kel. Akesolar	-	-	-	-
18	Simson	Pokdakan Dubu Bersinar	-	-	-	-
19	Kamarun Hi. Sabea	Pokdakan Maku Sigaro	-	-	-	-
20	Zulvichkar Muhammad	Pokdakan Halaro	1.30723E+12	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Mikro

❖ Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 20 pelaku usaha dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.25. Hasil Pengawasan Budidaya Perikanan

NO	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Skala Usaha
1	PT. Perikanan Indonesia Cabang Bacan	'2312210030696	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	Menengah dan Besar
2	PT. Intimas Surya	'8120003851916	1. 10213-Industri Pembekuan Ikan, 2. 10217 - industri pendinginan/pengesan	Menengah
3	PT. Adfani Bintang Samudra	0606220029566	Belum memiliki KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	-
4	PT. Harta Samudra	8130116081128	Industri Pendinginan dan Pengesan Ikan/ 10217	Menengah dan Besar
5	CV. Arbil	'8120018261684	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	Menengah
6	CV. Maluku Fortuna	'0220100772244	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	-
7	PT. Kelola Mina Samudra	'9120404750529	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan dan 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	-
8	CV. Mitra Tuna Mandiri	'140220054153	KBLI 10213 - Industri	Kecil

			Pembekuan Ikan dan 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	
9	Firma Sanu	'1006230056336	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	Mikro
10	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Menengah dan Besar
11	PT. Edmar Mandiri Jaya Cabang Ternate	8120205921472	Belum memiliki KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan, pada alamat Kantor di Ternate	Kecil
12	PT. Maluku Prima Makmur	8120001970582	KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya dan KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Menengah dan Besar
13	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	8120213051393	1. KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan 2. KBLI 10217 - Industri Pendinginan dan Pengesan Ikan	Besar
14	PT. Peduli Laut Maluku	8120113030328	1. 'KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan 2. KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan 3. KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Besar
15	PT. Maluku Prima Sukses	9120007522659	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan dan KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Besar
16	Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya	1264000431659	KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Besar
17	PT. Wahana Lestari Investama	9120203590631	KBLI 10293 / Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Besar
18	PT. Lumbung Ikan Maluku	2403230066137	KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan dan KBLI 10213 - Industri Pemberkuan Ikan	Menengah
19	PT. Harta Samudra	8120116081128	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan dan KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Besar
20	PT. Irama Prima Sejahtera	0912220031445	KBLI 10213- Industri Pembekuan Ikan - KBLI 10293- Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - KBLI 10217-Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Mikro

❖ Pengawasan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 16 pelaku usaha dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.26. Hasil Pengawasan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Nomor Kode Proyek	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Skala Usaha
1	PT. Perikanan Indonesia Cabang Bacan	'2312210030696	-	Belum menambahkan KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan pada NIB	Menengah dan Besar
2	PT. Intimas Surya	'8120003851916	Sudah ada	46206 - Perdagangan	Menengah

			didalam sistem oss	Besar Hasil Perikanan	
3	PT. Adfani Bintang Samudra	0606220029566	Sudah ada didalam sistem oss	46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	-
4	PT. Harta Samudra	8120116081128	Sudah ada didalam sistem oss	46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Besar
5	PT. Bahana Maluku	'1279000231193	202102-1915-5449-5217-729	46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Besar
6	CV. Arbil	'8120018261684	-	46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	-
7	CV. Maluku Fortuna	'0220100772244	202107-1314-1601-6749-441	46206.A - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	-
8	PT. Kelola Mina Samudra	'9120404750529	Sudah ada didalam sistem oss	KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	-
9	CV. Mitra Tuna Mandiri	'140220054153	Sudah ada didalam sistem oss	46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak	Kecil
10	Firma Sanu	'1006230056336	Sudah ada didalam sistem oss	Belum memiliki KBLI Perdagangan	Mikro
11	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	Sudah ada didalam sistem oss	KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Menengah dan Besar
12	PT. Edmar Mandiri Jaya Cabang Ternate	8120205921472	Sudah ada didalam sistem oss	Belum memiliki KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan, pada alamat Kantor di Ternate	Kecil
13	PT. Peduli Laut Maluku	8120113030328	Sudah ada didalam sistem OSS	1. 'KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Besar
14	PT. Maluku Prima Sukses	9120007522659	Sudah ada didalam sistem oss	1. 'KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Besar
15	Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya	1264000431659	Sudah ada didalam sistem oss	KBLI 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Besar
16	PT. Wahana Lestari Investama	9120203590631	201912-2917-2506-2458-906, 201912-2917-1506-2606-545	KBLI 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Besar

9. IKU 9 “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan”

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah

yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Tabel 3.27. Capaian kinerja IKU 9 “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
9	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan	100	100	100	100	100	100.00				

Pada tahun 2023 capaian IKU 9 “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan” tercapai sebesar 100%. Nilai capaian tidak dapat disandingkan dengan nilai capaian di tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini tidak ditargetkan pada tahun sebelumnya sehingga capaian IKU ini dapat menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Tabel 3.28. Perhitungan Indeks kinerja penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan”

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Laporan Masyarakat/Pulbaket	Target	Selesai
1	PT. Lumbang Ikan Maluku	Negeri Lama, Ambon, Maluku	Laporan diduga terdapat benih lobster sesuai laporan dari pengawas perikanan pada Stasiun PSDKP Cilacap	√	√

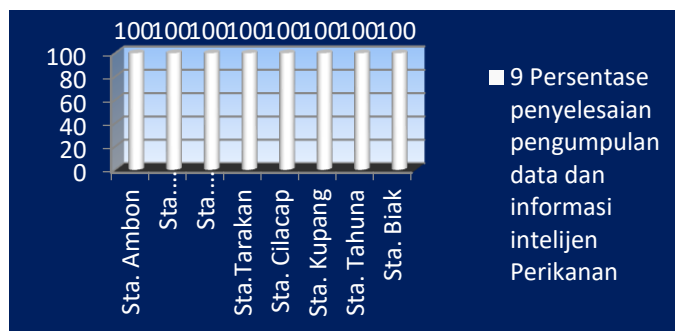
Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X_{intl} : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
 a : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang selesai dikumpulkan
 b : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang ditargetkan dikumpulkan

IKU “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP lainnya atau sebesar 100%.



Gambar 3.10. Capaian kinerja “kinerja penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan”

10. IKU 10 “Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan peneanaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk peneanaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk peneanaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Tabel 3.29. Capaian kinerja IKU 10 “Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

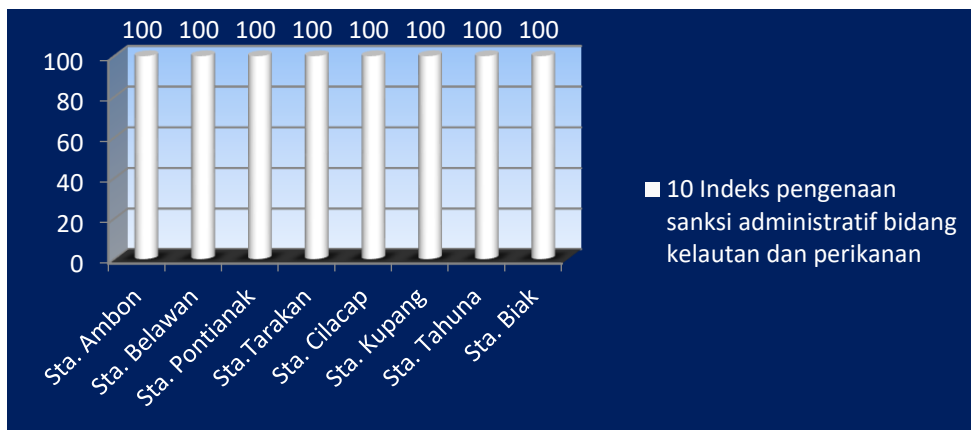
No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
10	Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	80	100	120	100	125.00	100	100	100	

Pada tahun 2023 capaian IKU 10 “Persentase penelesaian sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan” tercapai sebesar 100%. Nilai capaian di tahun 2023 sama dengan nilai capaian yang dicapai pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sehingga capaian IKU ini dapat menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Tabel 3.30. Perhitungan Indeks kinerja penelesaian sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan”

No	Nama Kapal (GT)	Pelanggaran	Proses Penelesaian			
		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administrative (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administrative, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Jumlah Denda Administrative (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	KM. INKA MINA 916	Pelanggaran tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 117.000.000,-	820230220870099	21-02-2023
2	KM. KELVIN I	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 28.080.000	820230220863147	20-02-2023
3	KM. NAGA MAS III	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 24.480.000,-	820230413467290	13-04-2023
4	KM. SINAR ENO	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 11.832.000,-	820230413461392	13-04-2023
5	KM. SENAR 010	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 22.620.000,-	820230906376599	06-09-2023
6	KM. OMEGA STAR 99	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 8.125.000,-	20230906378707	06-09-2023
7	KM. SENAR 009	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administrative	Rp. 14.625.000,-	820230906375528	06-09-2023

8	PT. BAHANA MALUKU,	Pelanggaran terhadap ketentuan tidak memiliki dokumen PKKPR dan Izin Reklamasi	Denda Administratif	Rp. 46.814.568,-	820231017125950	20-10-2023
9	KM. BINTANG CEMERLANG	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administratif	Rp. 4.601.100,-	820231219831421	20-12-2023
10	KM. YORA 02	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administratif	Rp. 4.447.730,-	820231219833066	20-12-2023
11	KM. YORA 01	Pelanggaran terhadap ketentuan : tidak memenuhi perizinan berusaha berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administratif	Rp. 4.447.730,-	820231219833623	20-12-2023



Gambar 3.11. Capaian kinerja “kinerja penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

IKU “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen Perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP lainnya atau sebesar 100%.

11. IKU 11 “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem

pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 3.31. Capaian kinerja IKU 11 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
11	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	80	100	120	100	125.00				

Pada tahun 2023 capaian IKU 11 “presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” tercapai sebesar 100%. Nilai capaian di tahun 2023 belum dapat disandingkan dengan nilai capaian di tahun 2020-2022 sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Tabel 3.32. Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

No	Jumlah Dugaan Pelanggaran	Selesai diperiksa	
1	60 Kanal	60 kanal perikanan	√

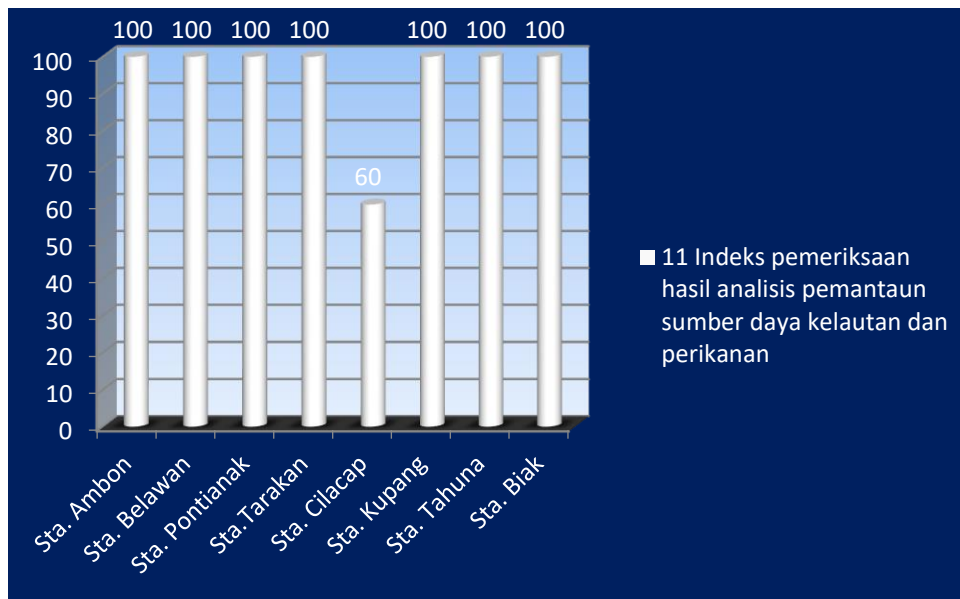
FORMULA

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_n)}{n} \times 100\%$$

$$X_{TLP} = \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$X_{TLP} = 100\%$$

- X_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;
- \sum : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;
- n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan



Gambar 3.12. Capaian kinerja “kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

IKU “pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP lainnya atau sebesar 100% namun ada satu UPT yang memiliki nilai capaian yang rendah pada IKU ini yaitu Stasiun PSDKP Cilacap dengan nilai capaian 60%.

12. IKU 12 “Indeks penyelesaian tindak lanjut peneanaan sanksi administratif”

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Peneanaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV peneanaan sanksi administratif oleh Stasiun PSDKP Ambon berdasarkan hasil perhitungan jumlah nilai tahapan monev peneanaan sanksi administratif dibagi jumlah pelaksanaan Monev peneanaan sanksi administratif.

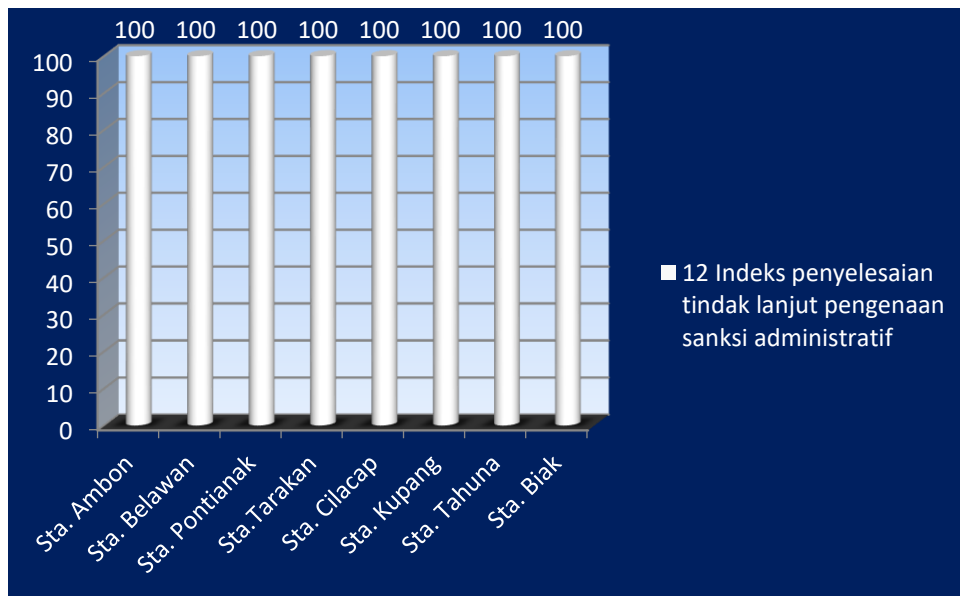
Tabel 3.33. Capaian kinerja IKU 12 “indeks penyelesaian tindak lanjut peneanaan sanksi administratif”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
12	Indeks penyelesaian tindak lanjut peneanaan sanksi administratif	80	80	100	120	100	125.00				

Pada tahun 2023 capaian IKU 12 “Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif” tercapai sebesar 100%. Nilai capaian di tahun 2023 belum dapat disandingkan dengan nilai capaian di tahun 2020-2022 sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Tabel 3.34. Perhitungan Indeks kinerja penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif”

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persiapan	20	Laporan Pengenaan Pelanggaran Sanksi Administratif	
2	Analisis pemilihan lokasi MONEV	20	Dokumen Rencana Pelaksanaan MONEV	ST/Memo/Rencana Kegiatan Disposisi /Dokumen Lainnya
3	Pelaksanaan koordinasi, Supervisi/MONEV	55	Dokumentasi pelaksanaan	
4	Penyusunan laporan Supervisi/MONEV	5	Laporan pelaksanaan MONEV	
JUMLAH		100		



Gambar 3.13. Capaian kinerja “penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP”

IKU “penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil

capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP lainnya atau sebesar 100%.

13. IKM 13 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO).

Tabel.3.35 Capaian IKM 13. “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

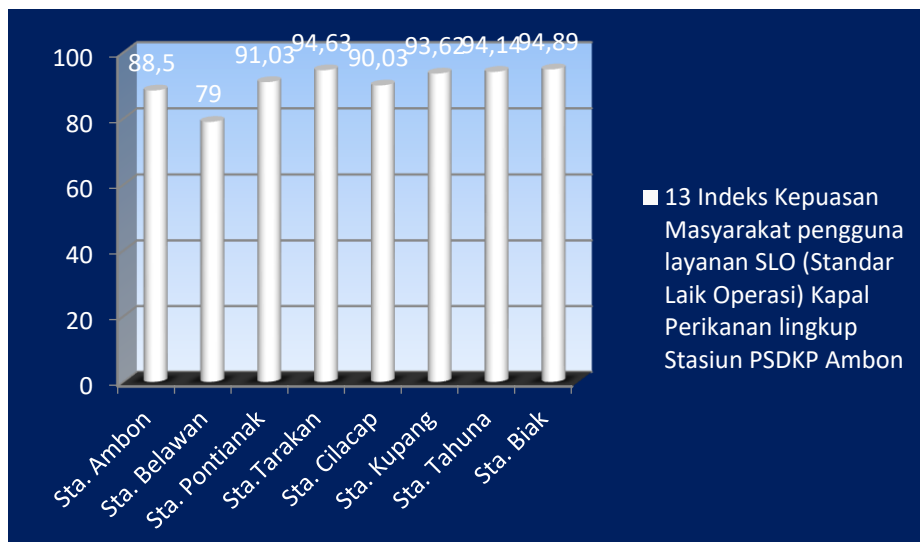
No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
13	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	88.5	110.6	88.5	110.63	92.1	91.4	90.8	

Pada tahun 2023 capaian IKM 13 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 85,5 atau 110.6 dari target yang ditetapkan yakni 80 (tabel 3.35). berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan. Hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Survey ini dilakukan dengan pengisian kuesioner pada pos pelayanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan dan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Berdasarkan hasil IKM Tahun 2023 maka dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dinilai baik oleh para

pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan pelayanan penerbitan SLO. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon telah baik diterima oleh seluruh pengguna layanan yakni para nelayan dan pelaku usaha namun butuh pengembangan lebih baik lagi.

IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon masih berkisar 88,5% dibawah UPT lainnya yang berkisar antara 90-94%. Berikut merupakan hasil capaian IKU ini pada seluruh UPT DITJEN PSDKP (Gambar 3.14).



Gambar 3.14. Capaian IKM 13. “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon” lingkup UPT DITJEN PSDKP

14. IKM 14 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IKM 14 “Persentase Pelaksanaan

Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” pada tahun 2023 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100 (Tabel 3.36).

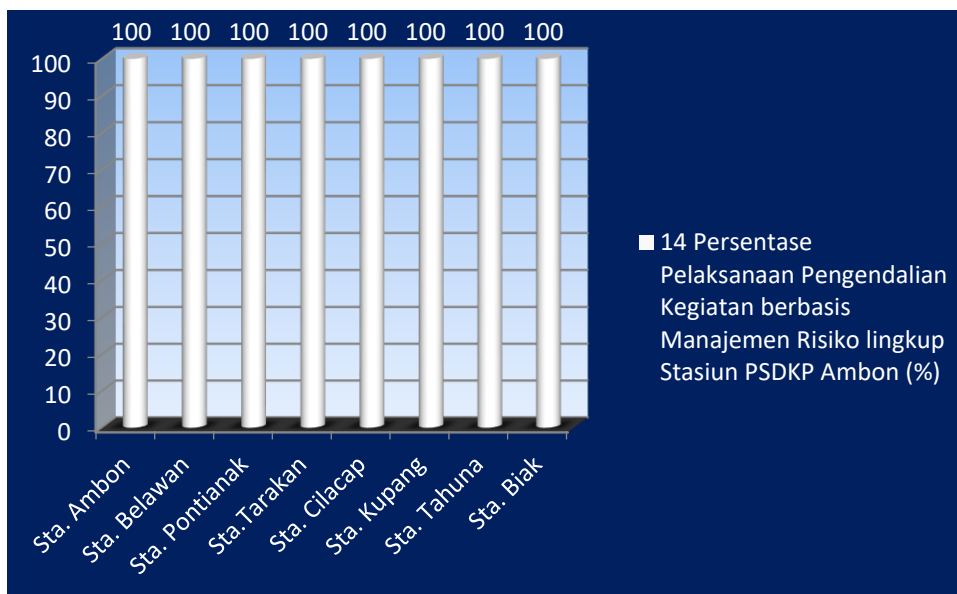
Tabel 3.36 “Capaian IKM 14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	s.d 2024
14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100	100	100	100	100	100.00				

IKM ini merupakan perhitungan baru di tahun 2023 sehingga nilai capaian tidak dapat disandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun dengan target jangka menengah. Capaian IKM ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IKM ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 3.15)



Gambar 3.15. Capaian IKM 14. “Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon lingkup UPT DITJEN PSDKP”

15. IKM 15 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

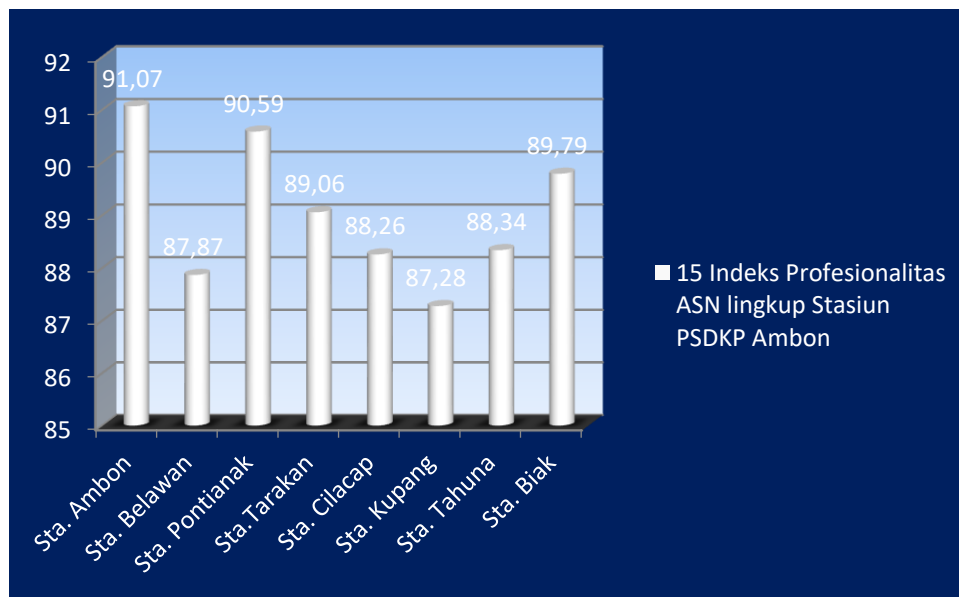
1. Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
2. Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
3. Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
4. Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:

- DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
5. Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
- DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
6. Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:
- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
 - b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
 - c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
 - d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
 - e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
7. Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
- a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Tabel 3.37 “Capaian IKM 15. Persentase Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	78	78	91.07	116.8	91.07	116.76	73.6	72.3	80	

Pada tahun 2023 capaian IKM 15 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 91.07 atau 1168 dari target yang ditetapkan yakni 78(tabel 3.37). berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.16. Capaian IKM 15. “Pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 87 – 91% dengan indeksi capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Ambon 91.07 %.(Gambar 3.15)

16. IKM 16 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

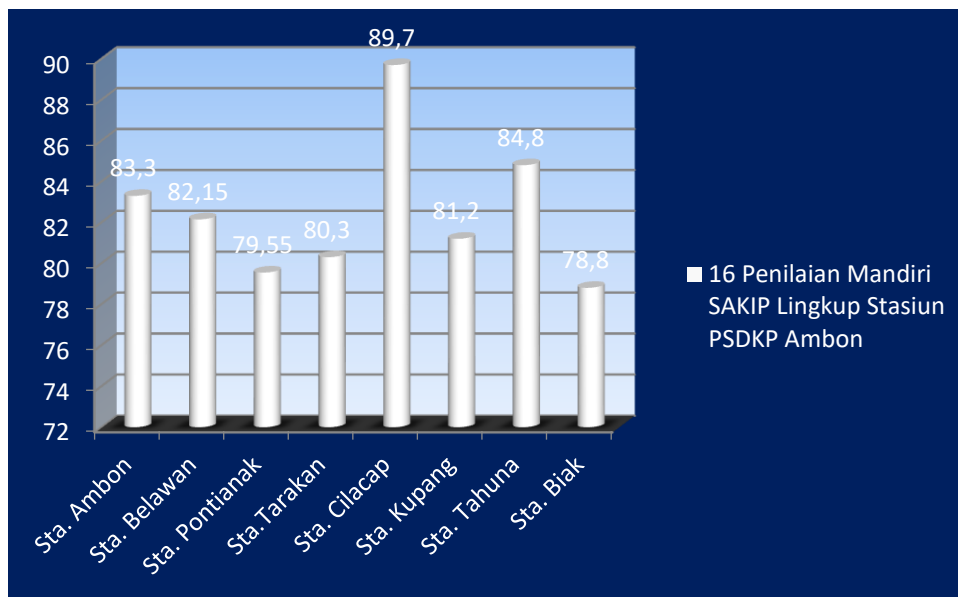
Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Tabel 3.38 “Capaian IKM 16. Persentase Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80.5	80.5	83.3	103.5	83.3	103.48				

Pada tahun 2023 capaian IKM 16 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 83.03 atau 103.5 atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 80.5 (Tabel 3.38). Berdasarkan nilai capaian tersebut belum dapat disandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 dikarenakan capaian ini belum ditargetkan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.17. Capaian IKM 16. “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 78 – 89% dengan indeks capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Cilacap dan terendah ada pada Stasiun PSDKP Biak.(Gambar 3.16)

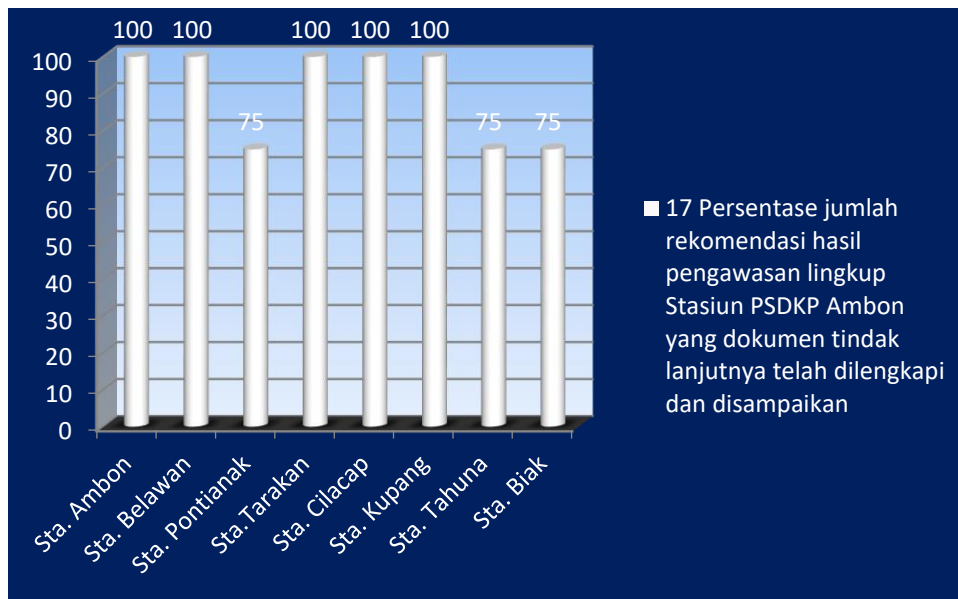
17. IKM 17 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 3.39 “Capaian IKM 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	75	100	120	100	133.33			100	

Pada tahun 2023 capaian IKM 17 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ” sebesar 100 atau 120% atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 75 (Tabel 3.39). Berdasarkan nilai capaian tersebut belum dapat disandingkan dengan capaian tahun 2020, dan 2021 dikarenakan capaian ini belum ditargetkan namun capaian tahun 2023 sama hasilnya dengan capaian tahun 2022 yakni sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.18. Capaian IKM 17. “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Tahuna dan Stasiun PSDKP Biak berkisar 75% dan angka capaian 100% diraih oleh Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Cilacap Stasiun PSDKP Kupang.(Gambar 3.18)

18.IKM 18 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)

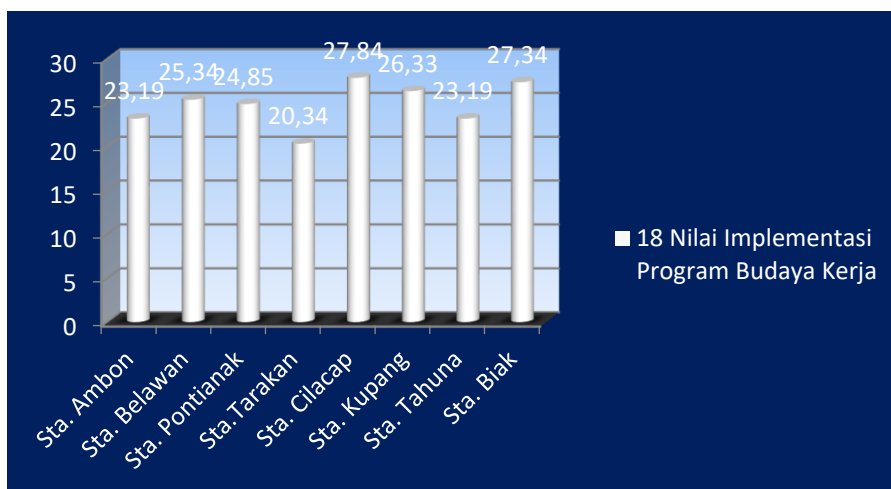
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Tabel 3.40 “Capaian IKM 18. Persentase Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (%)”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	21	23.19	110.4	23.19	110.43			23.2	

Pada tahun 2023 capaian IKM 18 “Persentase Nilai Implementasi Program Budaya Kerja “ sebesar 23.19 atau 110.4% atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 21 (Tabel 3.40). Berdasarkan nilai capaian tersebut belum dapat disandingkan dengan capaian tahun 2020, dan 2021 dikarenakan capaian ini belum ditargetkan namun capaian tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar antara 20-27% dengan nilai vapaian terndah ada pada Stasiun PSDKP Tarakan dan tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Cilacap.(Gambar 3.19)



Gambar 3.19. Capaian IKM 18. “Persentase Nilai Implementasi Program Budaya Kerja disampaikan lingkup UPT DITJEN PSDKP”

19. IKM 19 “Inovasi yang dihasilkan (inovasi)”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, khusus. Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%) . Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan.

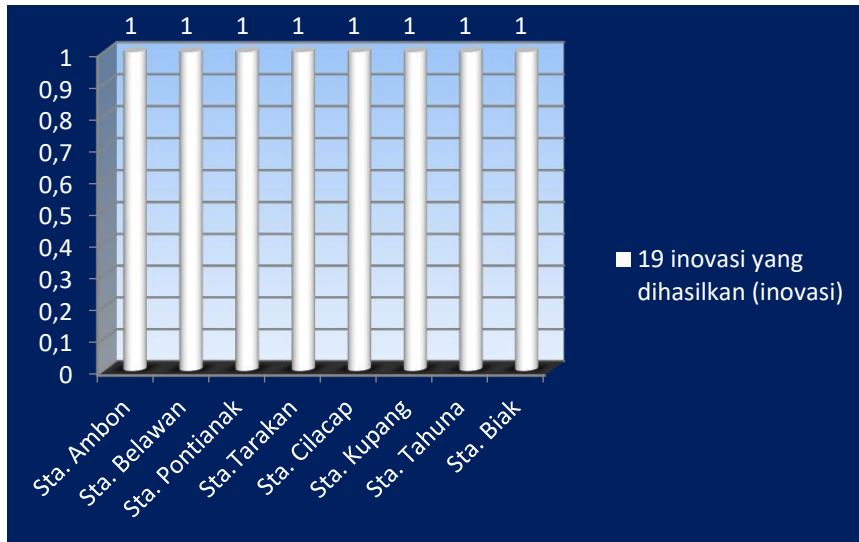
Tabel 3.41 “Inovasi yang dihasilkan”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
19	inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	1	1	100	1	100.00			1	

Pada tahun 2023 capaian IKM 19 “Persentase Inovasi yang dihasilkan “ sebesar 100% yakni 1 Inovasi yaitu Aplikasi AMANDAR. Berdasarkan nilai capaian tersebut belum dapat disandingkan dengan capaian tahun 2020, dan 2021 dikarenakan capaian ini belum ditargetkan namun hasil capaian tahun 2023 sama dengan hasil capaian

inovasi di tahun 2022 yaitu 1 Inovasi sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% dengan jumlah inovasi masing-masing UPT yaitu 1 Inovasi.(Gambar 3.20)



Gambar 3.20. Capaian IKM 19. “Persentase Inovasi yang dihasilkan lingkup UPT DITJEN PSDKP”

20. IKM 20 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

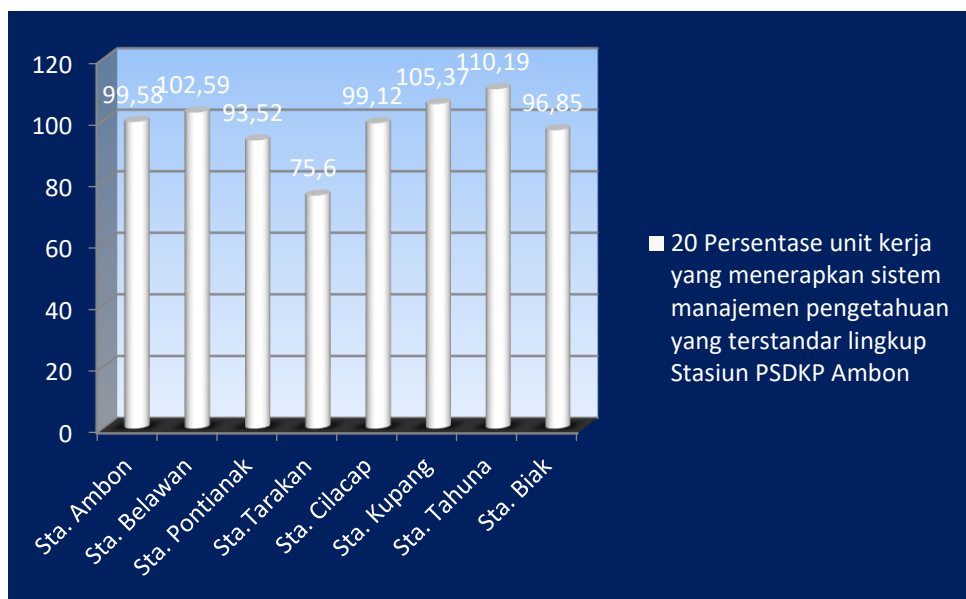
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Tabel 3.42 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	92	92	121.67	120	99.58	108.24	98.05	97.08	99.03	

Pada tahun 2023 capaian IKM 20 ““Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 121.67 atau 120 dari target yang ditetapkan yakni 92 (Tabel 3.42). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.21. Capaian IKM 20. “unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai

dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 75.6– 110.19% dengan indeks capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Tahuna 110.19 %

21. IKM 21 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada V. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

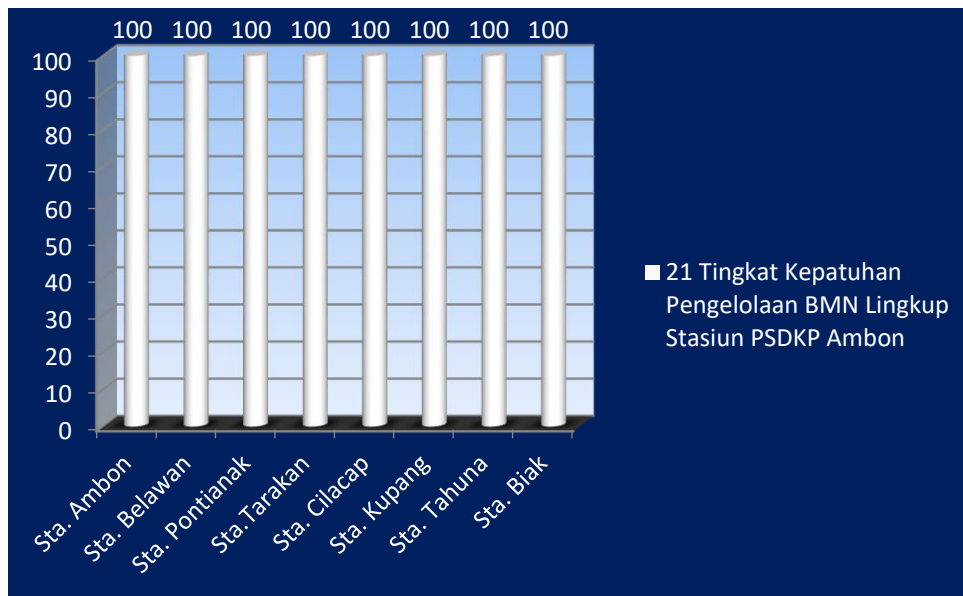
1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada tahun 2023 IKM 18 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tidak dilakukan pengukuran karena ditargetkan perhitungan pada akhir tahun 2023

Tabel 3.43 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77.5	77.5	100	120	100	129.03	89.06	100	100	

Pada tahun 2023 capaian IKM 21 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 100 atau 120 dari target yang ditetapkan yakni 77.5 (Tabel). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.22. Capaian IKM 21. “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%

22. IKM 22 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada V. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);

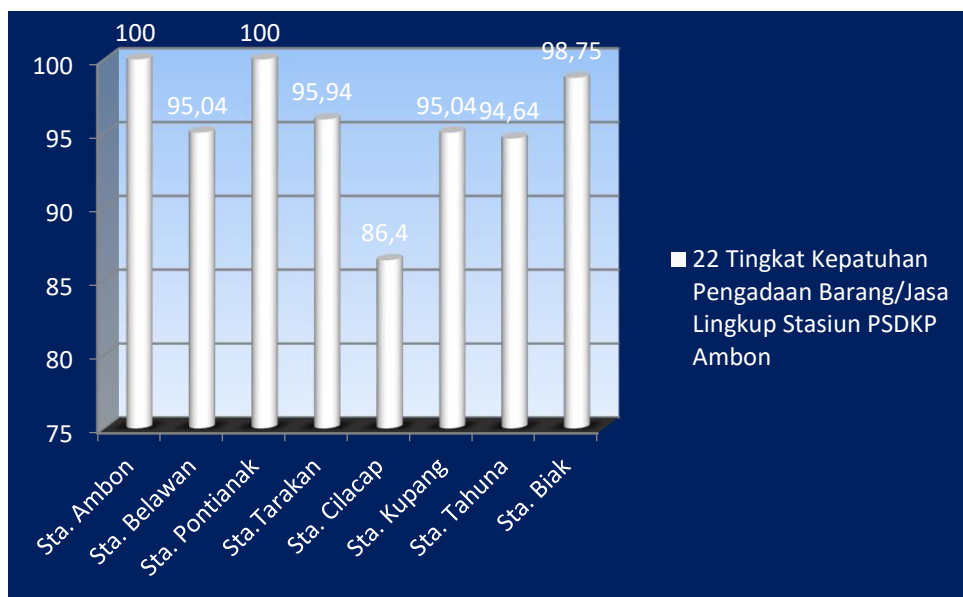
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2023 IKM 19 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tidak dilakukan perhitungan karena ditargetkan pada akhir tahun 2023.

Tabel 3.44 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	77.5	77.5	100	120	100	129.03		92.15	100	

Pada tahun 2023 capaian IKM 22 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 100 atau 120 dari target yang ditetapkan yakni 77.5 (Tabel). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.23. Capaian IKM 22. “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 86.4 – 100% dengan indeks capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Pontianak 100 %

23. IKM 23 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

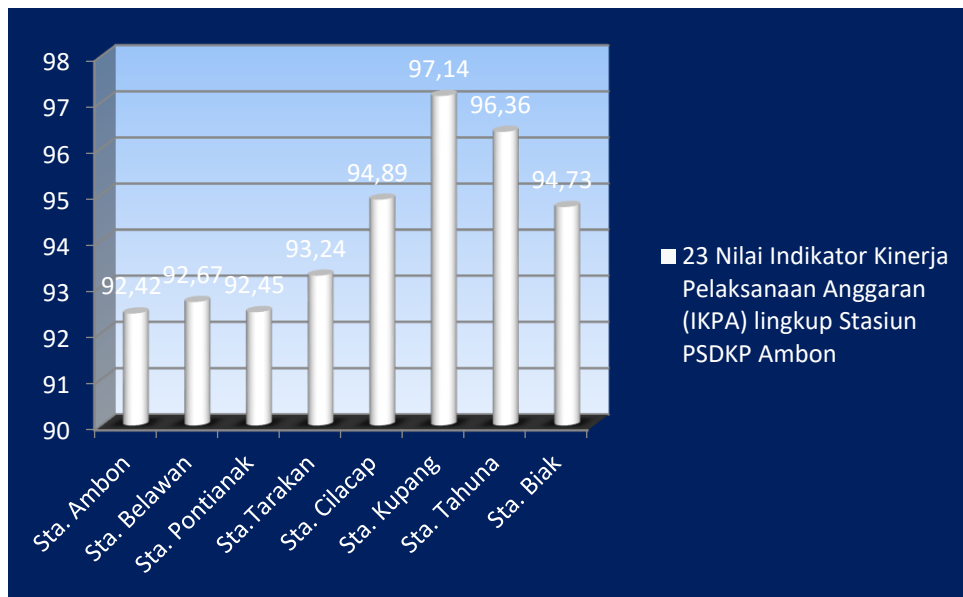
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Tabel 3.45 “Presentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93.75	93.75	92.42	98.58	92.42	98.58	97.59	92.26	93.65	

Pada tahun 2023 capaian IKM 23 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 92.42 atau 98.58% dari target yang ditetapkan yakni 93.75 (Tabel 3.45). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.24. Capaian IKM 23. “Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 92.42 – 97.14% dengan indeks capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Kupang 97.14 %

24. IKM 24 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA :

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
 - Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
 - Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)

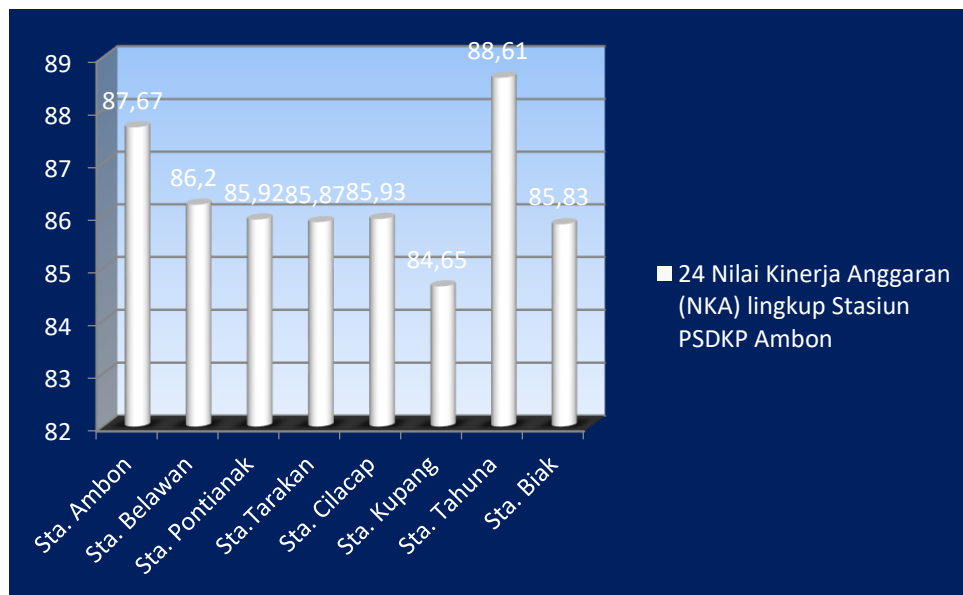
Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
2. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
3. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
4. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$; dan
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Tabel 3.46 “Presentase Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Capaian	%	Capaian			Target s.d 2024
		2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER		2020	2021	2022	
24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82	82	87.67	106.9	87.67	106.91		86.9	86.62	

Pada tahun 2023 capaian IKM 24 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 87.67 atau 106.9 dari target yang ditetapkan yakni 82 (Tabel). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IKM ini mengalami kenaikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah.



Gambar 3.25. Capaian IKM 24. “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup UPT DITJEN PSDKP”

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 84.65 – 88.61% dengan indeks capaian tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Tahuna 88.61 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Tahun 2023 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 25.677.241.438 (*dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*) atau 98,65% dari total yang dianggarkan Rp. 26.029.469.000 (*dua puluh enam milyar dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada Infrastruktur Pengawasan	14.740.092.000	14.511.980.411	98.45
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	150.000.000	144.608.215	96.41
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	520.197.000	511.616.341	98.35
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	290.250.000	282.657.464	97.38
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	10.328.930.000	10.226.379.007	99.01
Total		26.029.469.000	25.677.241.438	98.65

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 didukung dengan tersedianya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan serta digunakan data dukung capaian;
2. Nilai Capaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 101.39%, dengan kategori hijau. Hal ini didukung dengan tercapainya IKU dan IK Stasiun PSDKP Ambon; dan
3. Nilai capaian anggaran Stasiun PSDKP Ambon tahun 2023 dalam mendukung tercapainya kegiatan Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tahun 2023 yakni Rp. 10.179.323.147 (*sepuluh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) atau 44.88% dari total yang dianggarkan Rp. 22.679.536.000,- (*22 miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu*).

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon tahun 2023 telah tercapai dengan kategori hijau, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi di tahun 2023 yakni :

1. Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan ditingkatkan pada trwiulan II; dan
2. Keaktifan bitrix dalam menunjang nilai MP di .

C. Rekomendasi

1. Melakukan sinergi lebih lanjut dengan instansi penerbit perizinan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan dokumen perizinan sesuai dengan aktifitas usaha yang dilakukan; dan
2. Memantau keaktifan bitrix lingkup Stasiun PSDKP Ambon.